



Analisis Kebijakan Izin Tinggal Permanen kepada Pencari Suaka Suriah di Swedia tahun 2013-2014

Rizki Nadhilah Ambarani, Fendy Eko Wahyudi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Syrian conflict that started from 2011 brings down civil casualties and creates the biggest refugee crisis in the world. Since then many Syrians are trying to go outside the border of their country to find and get protection from other countries. European countries become one of the most popular destination for the refugees and asylum seekers. Sweden get the most Syrian asylum applicant per capita in 2012. Sweden that governed by Alliance regime in 2013, decides to make a policy to give permanent residence permit for all of Syrian asylum seeker that come to their country. This research used qualitative methods alongside with ignoring and compromise approach in Foreign Policy Analysis theory to explain reason behind Sweden's government decision to give permanent residence permit for Syrian asylum seeker in 2013. The result of this research indicated that the policy regarding permanent residence permit for Syrian asylum seeker were government's strategies (ignoring and compromise) for the existence of populist party Sweden Democrats for the first time in Sweden's parliament after winning 2010 elections.

Keywords: *Syrian Assylum Seeker, Foreign Policy Analysis, Alliance, Sweden Democrats.*

PENDAHULUAN

Fenomena *Arab Spring* yang terjadi dikawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) juga menimbulkan dampak protes di Suriah yang ditandai dengan protes oleh aktivis pro-demokrasi terhadap pemerintahan Presiden Bashar Al-Ashad (www.bbc.com, 2016). Protes yang awalnya dilakukan secara damai akhirnya pecah menjadi konflik bersenjata setelah pihak pemerintahan Assad menanggapi protes demonstran dengan penahanan, kekerasan, hingga pembunuhan (www.aljazeera.com, 2017). Perang sipil terjadi setelah kelompok-kelompok pemberontak seperti Pasukan Pembebasan Suriah, *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL), Al-Nusra (yang selanjutnya disebut sebagai Jabhat Fateh Al-sham), Hizbullah, serta Pasukan Demokratik Suriah mulai banyak terbentuk untuk ikut berperang melawan kelompok pemerintah dan berusaha menguasai beberapa tempat di Suriah (www.bbc.com, 2016).

Konflik bersenjata ini tidak hanya menyebabkan 250.000 orang meninggal, namun juga membuat 4,5 juta orang pergi meninggalkan Suriah ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Turki sejak konflik mulai terjadi (www.bbc.com, 2016). Selain itu sekitar 10% dari total tersebut atau tepatnya sebanyak 429.000 orang mencari perlindungan dengan mengajukan status sebagai pencari suaka di negara-negara Eropa sejak tahun 2011 (www.unhcr.org, 2015). Salah satu negara yang menjadi tujuan utama para pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan. Bahkan di tahun 2014, Swedia merupakan negara yang menerima jumlah permohonan suaka terbesar perkapita dan nomor dua tertinggi diantara negara-negara anggota Uni Eropa (IFRC, 2016:3). Swedia sendiri dikenal sebagai negara "safe haven" dengan kebijakan-kebijakan yang baik terkait dengan pendampingan, bantuan, dan proses *reunification* keluarga yang cepat (REACH, 2015:8). Selain itu, sistem akomodasi dan penerimaan komprehensi dalam penerimaan pencari suaka juga diberikan oleh Swedia (www.migrationsverket.se, 2016).

Bersamaan dengan terus meningkatnya jumlah permohonan suaka yang masuk, serta eskalasi konflik yang terus terjadi di Suriah, pada tahun 2013 pemerintah Swedia memberikan izin tinggal permanen kepada semua masyarakat Suriah yang mengajukan permohonan suaka di negaranya (www.sverigesradio.se, 2013). Kebijakan ini merupakan kebijakan pertama kalinya yang dikeluarkan oleh negara anggota Uni Eropa (www.sverigesradio.se, 2013). Di sisi lain, kehadiran dan peningkatan jumlah pencari suaka, pengungsi, dan imigran sering kali memicu perdebatan terkait dengan dampak dari fenomena tersebut pada permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan di negara yang dituju. Peningkatan jumlah pendatang dalam jumlah besar dapat membuat partai populis, anti-imigran, serta gerakan sayap kanan tumbuh dan berkembang di beberapa negara (Barysch, 2016). Selain itu, kelompok-kelompok *xenophobic* dapat melakukan pergerakan dan melakukan protes yang selanjutnya bisa berdampak pada keamanan nasional sebuah negara tersebut (Schmid, 2016:40). Kehadiran pendatang ini juga dikaitkan dengan kegiatan terorisme di masa akan datang, sehingga menurut beberapa petinggi negara Eropa, seperti Perdana Menteri Slovakia dan Italia diantara pendatang tersebut termasuk orang-orang yang berisiko dan terhubung dengan kelompok-kelompok terorisme (Koser & Cunningham, 2015:84). Dengan demikian, penelitian ini untuk mengalisa faktor apa yang memengaruhi pemerintah Swedia memberikan izin tinggal permanen kepada pencari suaka asal Suriah yang berlangsung pada tahun 2013-2014.

Penelitian ini selanjutnya menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* yang berfokus pada level politik domestik dengan konsep *ignoring* dan kompromi. FPA yang dijelaskan oleh Valerie M. Hudson dalam bukunya *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary* dilibatkan dalam menguji bagaimana sebuah kebijakan luar negeri dibuat, serta mengaggap manusia bertindak secara individu ataupun kolektif dalam proses pembuatannya (Hudson & Vore, 2003:5). Dalam FPA setidaknya ada lima level analisis kebijakan luar negeri, diantaranya: level pemimpin, level *groupthink* dan birokrasi, level kebudayaan dan identitas nasional, level politik domestik dan oposisi, serta level atribut nasional dan sistem internasional (Hudson, 2014:32-35). Hudson (2014:6) menjelaskan pula bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah

perpanjangan dari kebijakan politik domestik sebuah negara tersebut. Salah satu fokus penting dalam melihat sebuah politik domestik adalah rezim, karena menurut Robert Dahl (1997 dalam Hudson, 2014:142) sifat rezim itu dapat memengaruhi negara terhadap satu sindrom tertentu. Sehingga institusi politik beserta aktor-aktor didalamnya baik aktor domestik maupun non-domestik turut menjadi perhatian penting pula karena menurut Robert Putnam (1998 dalam Hudson, 2014:145) aktor-aktor tersebut saling berperan dalam *game board of domestic politic* dan *game board of international politics*. Meskipun terkadang pula kedua *game boards* ini tidak jelas atau kabur terutama ketika menyangkut pada kedaulatan suatu negara bangsa.

Diantara aktor-aktor di politik domestik tersebut adalah partai politik beserta oposisinya (Hudson, 2014:144). Terdapat beberapa strategi dasar yang digunakan oleh suatu rezim untuk mencapai tujuannya ketika menghadapi atau memberikan respon terhadap oposisi diantaranya adalah *ignoring*, taktik langsung, taktik tidak langsung, dan kompromi (Hudson, 2014:151). Adapun strategi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah strategi *ignoring* dan kompromi. *Ignoring* merupakan strategi dengan menolak untuk bergabung atau mengikutsertakan oposisinya di dalam proses-proses yang dilakukan oleh rezim tersebut. Sedangkan strategi kompromi dilakukan oleh sebuah rezim untuk meredakan klaim dari oposisi. Strategi-strategi ini diperlukan mengingat bahwa kohesif atau terfragmentasinya aktor-aktor didalam rezim akan memengaruhi pula *power* di dalam *game board* politik domestik (Hudson, 2014:147).

Pada pemilihan umum 2010, *Sweden Democrats Party* untuk pertama kalinya berhasil menempatkan diri di palemen Swedia meskipun dikenal sebagai partai populis. Partai ini hadir menjadi oposisi rezim pemerintahan *Alliance* yang dipimpin oleh *Moderate Party*. Kebijakan memberikan izin tinggal permanen oleh pemerintah Swedia untuk pencari suaka asal Suriah di tahun 2013, merupakan bentuk strategi yang dilakukan oleh rezim pemerintahan *Alliance* dalam upayanya merespon kehadiran partai populis yang berkembang di Swedia sejak pemilu tahun 2010.

PEMBAHASAN

Sejak pecahnya konflik di Suriah pada tahun 2011 antara pemerintahan Presiden Bashar Al-Ashad dan kelompok-kelompok kontra pemerintah, konflik tersebut terus mengalami eskalasi sehingga membuat banyak penduduknya untuk keluar mencari perlindungan yang lebih baik dari negara lain. Para pencari suaka ini banyak memasuki wilayah Eropa melalui Laut Mediterania setelah sebelumnya sampai di negara-negara tetangga seperti Libya, Mesir dan Turki (REACH, 2015:4).

Walaupun isu imigran dan pengungsi sering kali memicu perdebatan di ranah politik Swedia, pada tahun 2013 pemerintah Swedia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fredrik Reinfeldt, memutuskan untuk memberikan izin tinggal permanen kepada seluruh pencari suaka yang masuk ke negaranya (www.sverigesradio.se, 2013). Kebijakan ini dibuat mengingat konflik yang terjadi belum akan berhenti dalam waktu dekat dan upaya untuk melindungi pencari suaka tersebut dari resiko serius apabila harus kembali ke negaranya karena permohonan suaka ditolak (Geddes & Scholten, 2016:133). Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, izin tinggal permanen bagi pencari suaka hanya diberikan oleh *Swedish Migration Agency (Migrationverket)* kepada

individu yang digolongkan sebagai pengungsi menurut Konvensi Jenewa (Jutvik & Robinson, 2020). Melalui kebijakan ini pula, memungkinkan para pencari suaka tersebut dapat melakukan proses reunifikasi dengan anggota keluarganya dan menetap secara permanen di swedia (www.dw.com, 2013).

Kebijakan ini selanjutnya mengundang kritik dari partai oposisi, SDP dan partai koalisinya menganggap kebijakan pemberian izin tinggal permanen kepada pencari suaka Suriah tersebut dapat menciptakan permasalahan terutama terkait dengan biaya penanganan (Geddes & Scholten, 2016:134). Selain itu, juru bicara SD, Kent Ekeroth juga menanggapi kebijakan ini ketika diwawancarai oleh BBC:

“No conflict is permanent but we still give them permanent residence. For one immigrant that comes here we could help hundreds, maybe thousands of people, (in and around Syria) with food, with medicine, with everything. So it’s actually an inhumane policy to bring them here to Sweden.” (Ekeroth, 2013).

Isu Imigrasi dan Pengungsi dalam Politik Swedia

Swedia merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlemen (*Riksdag*) yang didalamnya diisi oleh 349 perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum selama empat tahun sekali (www.riksdagen.se, 2016). Aturan utama sebuah partai politik dapat masuk dan memiliki perwakilannya di *Riksdag* adalah setidaknya memiliki empat persen suara dari hasil pemilu (www.riksdagen.se, 2016). Dari total 349 kursi, *Riksdag* diisi oleh setidaknya delapan partai besar yang diantaranya adalah *Moderate Party* (MP), *Social Democrats Party* (SDP), *Sweden Democrats* (SD), *Green Party* (GP), *Centre Party* (CP), *Left Party* (LP), *Liberal People’s Party* (LPP), dan *Christian Democrats Party* (CDP) (www.riksdagen.se, 2016).

Pada tahun 2004, koalisi *centre-right* yang terdiri dari MP, CP, LPP, dan CDP atau dikenal juga dengan koalisi *Alliance* dibentuk dengan tujuan untuk menyamakan setidaknya satu tujuan dan kepentingan diantara partai-partai ini. Koalisi ini juga dibentuk agar jumlah suara yang didapatkan oleh setiap partai didalamnya dapat diakumulasikan ketika adanya pelaksanaan pemilu. *Alliance* pertama kali berhasil menjadi pemenang pada pemilu tahun 2006 dengan status mayoritas dan mengalahkan koalisi oposisinya yang terdiri dari SDP, GP dan LP (Valmyndigheten, 2019). *Alliance* yang dipimpin oleh MP dan menunjuk Fredrik Reinfeldt sebagai Perdana Menteri selama periode tersebut. Koalisi ini berfokus pada permasalahan ekonomi terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pengurangan jumlah pengangguran, serta masalah kebebasan (www.moderaterna.se, 2016).

Pada pemilu 2010, *Alliance* kembali mendapatkan kemenangannya namun dengan status sebagai pemerintahan minoritas. Saat itu, *Alliance* hanya mendapatkan 173 dari 349 kursi (49,4%) di parlemen (OSCE, 2010). Menurut seorang analis politik, Stig Bjorn Ljungren (2010), kemenangan ini didapatkan oleh *Alliance* setelah koalisi ini mengubah program-program politiknya dan mampu mengabsorpsi nilai-nilai yang dipegang oleh SDP terutama terkait dengan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan (Al-Jazeera, 2010). Meskipun demikian, jumlah perolehan kursi yang didapatkan oleh koalisi ini tidak dapat menjadikannya sebagai pemerintahan mayoritas di periode kedua kepemimpinannya.

Berkurangnya jumlah kursi yang didapatkan *Alliance* di parlemen tidak lepas dari hadirnya SD untuk pertama kalinya di *Riksdag*. Pada pemilu 2010 tersebut, SD berhasil mendapatkan 20 kursi (5,7%) dimana jumlah kursi ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pada pemilu tahun 2006 (Valmyndigheten, 2019). SD berhasil mendapatkan dukungan suara dari pendukung dua blok yang ada di parlemen yaitu *Alliance* yang berada di blok *centre-right* dan koalisi *centre-left* (Statistics Sweden, 2011). Ketika *Alliance* dan koalisi *center-left* memiliki fokus kebijakan yang hampir sama yaitu terkait dengan isu ekonomi, SD hadir sebagai partai non-blok dan membawa isu-isu yang dikenal populis seperti anti-imigran dan anti-mutikulturalisme (Jungar & Jupskås, 2014). Dengan masuknya SD di parlemen membuat isu terkait imigrasi dan pengungsi menjadi 23% isu yang sering dibahas pada pemilu 2014, sedangkan pada pemilu 2010 isu tersebut hanya dibahas sebanyak 9% (Statistics Sweden, 2011). SD juga berhasil menjadi partai ketiga terbesar di parlemen walaupun tanpa adanya koalisi di salah satu blok, dengan 49 kursi pada pemilu 2014 dan 62 kursi pada pemilu 2018 (Valmyndigheten, 2020).

Strategi Kompromi dan Ignoring dalam Kebijakan Pemberian Izin Tinggal Permanen kepada Pencari Suaka Suriah tahun 2013-2014

Pemerintahan yang mayoritas di Swedia setidaknya harus mendapatkan 175 kursi perwakilan di parlemen, namun setelah pemilu 2010 *Alliance* hanya berhasil mendapatkan 173 kursi dari 349 kursi keseluruhan (Valmyndigheten, 2019). Dengan keadaan minoritas ini, sejak awal periode kedua kepemimpinannya, *Alliance* mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan dan diskusi dengan partai oposisinya yaitu SDP dan GP. Mengingat bahwa kohesif atau tidaknya sebuah rezim serta kuantitas aktor dalam rezim tersebut dapat berpengaruh dalam menentukan *power* yang dimilikinya dalam pembuatan suatu kebijakan (Hudson, 2014:147). Oleh karena itu, kompromi dapat menjadi solusi dalam situasi minoritas *Alliance* di parlemen seperti yang disebutkan oleh Reinfeldt ketika membacakan *Statement of Government Policy* di *Riksdag*:

“As we continue to take responsibility for Sweden, we do so based on a number of premises. The Alliance Government is a minority government. The Government will seek broad based and responsible solutions in Riksdag, where it may be natural to hold regular discussions with Green Party, in the first instance, but also the Social Democrats Party where appropriate.” (Reinfeldt, 2010).

Kompromi juga dapat menjadi strategi untuk meredam klaim dari oposisi yang memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat satu isu tertentu (Hudson, 2014:151). Perbedaan pandangan antara *Alliance* dan SD dapat dilihat dari cara keduanya dalam merespon isu-isu terkait dengan imigrasi, pengungsi dan pencari suaka. Sejak masa kampanye pemilu 2010, SD menjadi partai yang sangat vokal dan cenderung skeptis pada isu-isu tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebuah video kampanye yang dibuat oleh SD yang ditayangkan di beberapa TV nasional. Dalam video tersebut SD menggambarkan sekelompok wanita yang memakai setelan *burqa* dengan langkah tergesa-gesa mendahului seorang wanita yang secara fisik digambarkan sebagai wanita kulit putih lanjut usia yang bertongkat dan berjalan lambat menuju

sebuah konter bank yang menyediakan dana pensiunan dan imigrasi (MrComptetemporaire, 2010). Melalui video tersebut, SD secara jelas menyatakan pandangannya bahwa identitas nasional merupakan unsur penting yang harus dipertahankan, sehingga kedatangan orang asing dari luar wilayah Eropa akan menambah permasalahan dari berbagai sektor domestik terutama ekonomi dan kesejahteraan.

Pada awal tahun 2011, *Alliance dan GP* yang merupakan bagian dari *centre-left* mencapai kesepakatan umum terkait dengan imigrasi dan suaka (www.thelocal.se, 2011).

“This year, an agreement was reached between the Alliance Government and the Green Party on overall asylum and migration policy. This agreement is important in upholding and open Sweden. It is also one of several manifestations of the broad solutions for Sweden for which the Government continues to strive”. (Reinfeldt, 2011).

Reinfeldt juga menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini memiliki keyakinan bahwa Swedia harus memiliki kebijakan suaka dan imigrasi yang liberal dan menutup pintu pada pihak-pihak *xenophobic* (www.thelocal.se, 2011). Göran Hägglund, pemimpin CDP menyatakan bahwa kesepakatan ini menciptakan pemerintahan yang lebih stabil di parlemen dan meyakinkan bahwa SD tidak akan memiliki pengaruh pada kebijakan terkait imigrasi kedepannya (www.thelocal.se, 2011). Sedangkan pemimpin SD, Jimmie Akesson menganggap bahwa rancangan keuangan dari hasil kesepakatan tersebut seharusnya bisa digunakan untuk hal lain (www.thelocal.se, 2011).

Kesepakatan *Alliance dan GP* ini selain untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil di parlemen juga merupakan bentuk *ignoring* terhadap keberadaan SD. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan-perwakilan partai. Strategi *ignoring* ini dilakukan dengan cara tidak mengikutsertakan dan melibatkan pihak oposisi pada satu kebijakan tertentu agar tercapai tujuan dan agenda kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, sejak awal SD hadir di parlemen, *Alliance* telah menentukan arah politiknya untuk tidak mengikutsertakan SD terutama dalam kebijakan imigrasi dan pengungsi.

“We will not use their language, we will not give them influence. We’ll isolate them and we believe in our open model... The only influence that they are interested in is a kind of influence where they want to hit the immigrants. And I don’t believe in that kind of influence” (Reinfeldt, 2013).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Reinfeldt ketika diwawancarai oleh Euronews dalam program *The Global Conversation* (2013), dimana Reinfeldt dengan tegas akan mengisolasi SD dan tidak memberikannya pengaruh karena mereka yakin pada masyarakat yang terbuka akan pengungsi dan imigrasi.

Pada tahun 2013, pemerintah *Alliance* mengeluarkan kebijakan terkait pencari suaka asal Suriah yang datang ke negara tersebut. Kebijakan pemberian izin tinggal permanen ini merupakan kebijakan yang pertama kali dilakukan diantara negara-negara anggota UE. Apabila dilihat dari FPA, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi dan respon *Alliance* terhadap keberadaan SD di parlemen yang telah membawa isu imigrasi

khususnya pengungsi menjadi sebuah isu politis yang bernilai untuk diperdebatkan. Strategi-strategi ini, baik melakukan kompromi dengan GP yang merupakan partai oposisi *Alliance*, maupun dengan *ignoring* terhadap kehadiran SD pertama kalinya di parlemen, dilakukan untuk mencapai tujuan dan agenda kepentingan *Alliance* itu sendiri. Sejak awal diberntuknya *Alliance*, fokus utama koalisi ini adalah isu terkait dengan kebebasan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran. Keberhasilan *Alliance* pada pemilu 2010 tidak lepas pula karena banyaknya dukungan dari *switch voters*. Sekitar 102.000 orang merupakan pemilih SDP pada 2006 dan 96.000 orang yang merupakan bukan pemilih di pemilu 2006 memutuskan memberikan dukungannya kepada partai pemimpin *Alliance* yaitu MP (Statistics Sweden, 2011).. Adapun isu yang membut banyaknya jumlah *switch voters* pada pemilu tersebut diantaranya adalah ekonomi, ketenagakerjaan, pajak, dan imigrasi (Statistics Sweden, 2011)

Pada periode tahun 2008-2010, pemerintah melalui Menteri Integrasi dan Kesetaraan Gender mengeluarkan *Fact Sheet* terkait kebijakan integrasi. Secara umum, tujuan utama kebijakan integrasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pendatang baru di pasar tenaga kerja dan mengatasi permasalahan pengangguran (Bloms, 2014). Fondasi yang digunakan untuk membangun integrasi ini adalah pekerjaan dan kesempatan untuk bisa menyokong kehidupannya sendiri. Para pendatang ini aka difokuskan pada mendapatkan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan sendiri, kemampuan berbahasa, dan pengetahuan terait bagaimana bermasyarakat (Swedish Government, 2011). Ketiga hal tersebut dilakukan agar pendatang baru lebih cepat diperkenalkan pada dunia kerja dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, para pendatang akan mendapatkan akses sekolah, kelas bahasa, dan kelas persiapan kerja (Ministry of Integration and Gender Equility, 2014).

Proses pengenalan yang cepat ini selajutnya dapat menjadi stimulus pada pasar tenaga kerja sehingga akhirnya para pendatang diharapkan dapat segera berintegrasi dan berkontribusi. Pemimpin CP, Maud Oloffson pada saat dibentuknya koalisi antara *Alliance* dan GP menyatakan bahwa penting untuk menggabungkan migrasi dan kebijakan tenaga kerja (www.thelocal.se, 2011). Selain itu Oloffson juga menyatakan bahwa pendatang baru diharapkan dapat bekerja baik secara mandiri ataupun bekerja dengan orang lain mengingat memiliki pekerjaan adalah hal penting. Reinfeldt ketika diwawancarai oleh Euronews (2013) terkait dengan pengungsi Suriah menyatakan:

“We should acknowledge that we already have a lot of people of Syrian origin in this country so a lot of the know people, have relatives who are actually coming to Sweden. In the past, the Syrians have been very easy compared to other groups in terms of integrating into the Swedish society, they are good entrepreneurs they often find their way into the labour market.” (Reinfeldt, 2013).

Menurut Reinfeldt, pengungsi asal Suriah merupakan kelompok yang lebih mudah dan cepat dalam melakukan integrasi dibandingkan kelompok lainnya, serta mereka juga tahu bagaimana masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Menurut Wakil Deputi Jenderal *Migrationsverket*, Mikael Ribbenvik, dengan diberikannya izin tinggal permanen maka para pendatang ini akan mengetahui bahwa di negaa tersebutlah masa

depannya tercipta sehingga mereka akan memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan izin tinggal sementara (Al-Jazeera, 2013). Sehingga dengan diberikannya izin tinggal permanen kepada pencari suaka Suriah, maka akan mempercepat proses *resettlement* dan integrasi bagi para pendatang ini. Dengan status menetap yang permanen tersebut maka para pendatang ini akan segera mendapatkan hak-haknya untuk berintegrasi dan diharapkan bisa segera berkontribusi dalam pasar tenaga kerja domestik.

KESIMPULAN

Kebijakan pemberian izin tinggal permanen kepada pencari suaka Suriah pada tahun 2013-2014 apabila dilihat menggunakan perspektif *ignoring* dan kompromi dalam level analisis *Foreign Policy Analysis* dari keadaan politik domestik, merupakan strategi politik *Alliance* dalam upaya mencapai tujuan dan agenda kepentingannya. Kompromi yang dilakukan oleh *Alliance* dan *Green Party* sebagai strategi untuk menciptakan rezim yang kohesif, serta menambah kuantitas aktor yang berperan sehingga dapat memperkuat *power* rezim kepemimpinan *Alliance* terutama dalam membuat keputusan-keputusan terkait dengan isu imigrasi dan pengungsi. *Ignoring* juga merupakan strategi politik dengan cara tidak melibatkan dan mengikutsertakan pihak-pihak oposisi dalam pembuatan suatu kebijakan. Sejak awal, *Alliance* yang dipimpin oleh Fredrik Reinfeldt sudah memutuskan untuk tidak mengikutsertakan dan mengisolasi *Sweden Democrats* pada isu-isu terkait imigrasi dan pengungsi. Kesepakatan dengan GP pada tahun 2011 pun memiliki tujuan untuk menjadikan pemerintah dalam keadaan stabil di parlemen terutama ketika membahas isu imigrasi dan pengungsi.

Sejak awal dibentuknya koalisi, *Alliance* fokus pada isu terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran. Dengan diberikannya izin tinggal permanen kepada pencari suaka Suriah, maka pendatang tersebut bisa segera diperkenalkan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial. Pendatang yang sudah mendapatkan izin tinggal permanen, akan segera ditempatkan dilokasi-lokasi *resettlement* dan mendapatkan hak-haknya termasuk mendapat akses kelas belajar bahasa dan kebudayaan Swedia, serta kelas yang memperkenalkan dunia kerja. Dengan proses pengenalan yang lebih cepat pada dunia kerja dan kehidupan sosial, maka para pendatang diharapkan pula segera bisa berintegrasi dan memberikan kontribusi pada pasar kerja Swedia. Proses percepatan ini merupakan salah satu strategi yang dibuat oleh pemerintah melalui *Fact Sheet* yang dikeluarkan oleh Menteri Kesetaraan Gender pada tahun 2008-2010.

REFERENSI

- Al Jazeera: (2013, November 24), *Sweden's Refugee Policy Sets High Standard*. Diambil dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/features/2013/11/24/swedens-refugee-policy-sets-high-standard>[Diakses pada 27 September 2020].
- Al Jazeera: (2015, Juli 09), *UNHCR: Syrian refugees cross four million mark*. Diambil dari Al Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2015/07/unhcr-syrian-refugees-4-million-150709033023489.html>[Diakses pada 03 September 2017].

- Al Jazeera: (2017, Agustus 06), *Syria's civil war explained from the beginning*. Diambil dari Al Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html> [Diakses pada 04 September 2017].
- Barysch, K. (2016, Februari 23), *Is Migration A Threat or An Opportunity for Europe?*. Diambil dari World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2016/02/is-migration-a-threat-or-an-opportunity-for-Europe> [Diakses pada 15 Agustus 2017].
- BBC: (2016, Maret 11), *Syria: The story of the conflict*. Diambil dari BBC: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868> [Diakses pada 04 September 2017].
- Bloms, S. F. (2014, Januari 16), *Assessing Immigrant Integration in Sweden after the May 2013 Riots*. Diambil dari Migration Policy Institute: <https://www.migrationpolicy.org/article/assessing-immigrant-integration-sweden-after-may-2013-riots> [Diakses pada 25 November 2020].
- DW: (2013, September 7). *Sweden opens doors to Syrian refugees*. Diambil dari DW: <http://www.dw.com/en/sweden-opens-doors-to-syrian-refugees/a-17072567> [Diakses pada 06 Januari 2017].
- Hudson, Vallerie M. (2008). *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. New York: Oxford University Press Inc.
- Hudson, Vallerie M. (2014). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory Second Edition*. United States: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- IFRC, 2016. "Smart practices that enhance resilience of migrants: Sweden." [online] Dalam <http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/380-IFRC-Migration-SwedenProfile.pdf>
- Jungar, A. C., & Jupskås, A. R. (2014). Populist Radical Right Parties in the Nordic Region: A New Distinct Party Family?. *Scandinavian Political Studies*, 3(37), hal. 215-238.
- Jutvik, K., & Robinson, D. (2020). Permanent or Temporary Settelement? A study of the short term effects to residence status on refugee's labour market participation. *Comparative Migration Studies*, 8(44), hal. 5.
- Migrationsverket: (2016), *Protection and Asylum in Sweden*. Diambil dari Migrationsverket: <https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden.html> [Diakses pada 05 Januari 2017].
- Moderaterna: (2016), *Our Policy in Brief*. Diambi dari Moderaterna: <https://moderaterna.se/var-politik-i-korthet> [Diakses pada 25 Desember 2017].
- Morris, C. (2013, Oktober 23). *Sweden's Asylum Offer to Refugees from Syria*. Diambil dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-24635791> [Diakses pada 04 Juli 2017].
- OSCE, 2010. "Sweden General Elections 19 September 2010" [online]. Dalam <https://www.osce.org/files/f/documents/e/3/70947.pdf> (diakses 16 Desember 2017).
- REACH. (2015). *Migration Trends and Patterns of Syrian Asylum Seekers Travelling to the European Union: Assesment Report*. REACH, hal. 7-8.

- Riksdagen: (2016, Desember 16). *Democracy*. Diambil dari Sveriges Riksdag: <http://www.riksdagen.se/en/members-and-parties/> [Diakses pada 14 Desember 2017].
- Schmid, A.P. (2016). Links Between Terrorism and Migration: An Exploration. The International Centre for Counter-Terrorism, no. 40, hal. 40.
- Statistics Sweden, 2011. "Eight Parties Election 2010" [online]. Dalam <https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/democracy/general-elections/general-elections-election-study/pong/publications/the-eight-parties-election-2010.-corrected-version-2011-12-29/> (diakses 10 Oktober 2020).
- Sverigesradio: (2013, September 03). *Syrians to get permanent residence in Sweden*. Diambil dari Sverigesradio: <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5634497> [Diakses pada 06 Januari 2017].
- Swedish Government, 2011. "Stataemnet of Government Policy" [online]. Dalam <https://www.government.se/49b72b/contentassets/1a5774074a8046a7bde6196d34c765ef/statement-of-government-policy-15-september-2011> (diakses 17 Desember 2017).
- The Local News: (2011, Maret 2011), *Sweden in 'historic' deal on immigration policy*. Diambil dari The Local News: <https://www.thelocal.se/20110303/32374> [Diakses pada 23 Februari 2018].
- UNHCR: (2020), *Pengungsi*. Diambil dari UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> [Diakses pada 01 Desember 2020].
- Valmyndigheten: (2019, Juli 4), *Election Result 2006-2010*. Diambil dari <https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2010/valresultat.html> [Diakses pada 19 Desember 2020]
- Valmyndigheten: (2019, September 12), *Election Result 2014*. Diambil dari <https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2014/valresultat.html> [Diakses pada 19 Desember 2020]
- Valmyndigheten: (2020, Oktober 23), *Election Result 2014*. Diambil dari <https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2018/valresultat.html> [Diakses pada 19 Desember 2020]